

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alfitra. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana (Edisi Revisi)*. Cet.

3. Raih Asa Suksus, Jakarta, 2018.

Banulita, Mia. *Asas Penuntutan Tunggal*. Cet. 1, Guepedia, Jakarta, 2023.

Darmono. *Penyampingan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Atas Nama Dr. Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah*. Cet. 1, Solusi Publishing, Jakarta, 2013.

Efendi, Jonaedi., Widodo, Ismu Gunadi., & Lutfianingsih, Fifit Fitri. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Cet. 1, Prenadamendia Group, Jakarta, 2016.

Effendy, Marwan Effendy. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Cet. 1, Gramedia Pustaka Utaman, Jakarta, 2005.

Hasnati. *Sosiologi Hukum Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat*. Cet. 1. Absolute Media, Yogyakarta, 2015.

Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan, Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Cet. 4. Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.

Krismen, Yudi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cet. 1. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.

- Lesmana, Teddy. *Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cet. 1, Pena Persada, Jawa Tengah, 2020.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- M, Hasim. *Pendidikan Kewarganegaraan 2*. Cet. 1. Yudistira Quadra, Jakarta, 2007.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Cet. 1. CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar., Rahim, A., & Guwi, Januhari. *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi*. Cet. 1. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
- Syarifuddin, M. *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020*. Cet. 1. Kencana, Jakarta, 2020.
- Salam, Safrin., dkk. *Perkembangan Filsafat Hukum Kontemporer*. Cet. 1. Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2020.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Cet. 1. Unigress Press, Jawa Timur, 2022.

Yusni, Muhammad. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press, Jawa Timur, 2019.

B. Jurnal

Agustalitas, Dinda Heidyuan., & Yuherawan, Deni Satya Bagus. "Makna "Kepentingan Umum" pada Kewenangan "Deponering" dalam Perspektif Kepastian Hukum". *Jurnal Suara Hukum*, Volume 4, Nomor 1, hlm. 172, 2022.

<https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p160-189>

Anggoro, Cahyo. "Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Badan Usaha Milik Negara". *Varia Justicia*, Volume 18, Nomor 1, hlm. 42, 2018.

<https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2044>

Cahyani, Endah. "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 80, 2022.

<https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15527>

Chalil, Sri Mulyati. "Pengesampingan Perkara (*Deponering*) oleh Jaksa Agung". *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 1, hlm. 7, 2016.

<http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/15>

Indonesia, Departemen Kehakiman Republik. "Kamus Hukum Deponering".

Citra Umbara. hlm. 87, 2008.

<https://katafuadi.com/wp-content/uploads/2023/07/10.->

Deponering-050722.pdf

Hamzah, Andi., dkk. "Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana". *Laporan Hasil Kerja BPHN*, hlm. 9, 2016.

https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_

dalam_hukum_acara_pidana.pdf

Kaihena, Nia Gabriella. "Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia". *Lex Privatum*, Volume 11, Nomor 1, hlm. 6, 2023.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/>

45762

Kusuma, Rahmawati. "Efektifitas Kebijakan Pemekaran Wilayah terhadap Peningkatan Pelayanan Publik". *Jatiswara*, Volume 26, Nomor 3, hlm. 8, 2011.

<http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/17>

Lengkong, Mario Randy. "Kewenangan Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana". *Lex Crimen*, Volume 4, Nomor 2, hlm. 62, 2015.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/77>

96

Mahavira, I Gusti Agung Angga., Suartha, I Dewa Made., & Layang, I Wayan Bela Siki. "Implikasi Hukum Pengaturan Kepentingan Umum sebagai Syarat Penggunaan Deponering oleh Jaksa Agung Menurut Hukum Positif Indonesia". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 3, hlm. 7, 2018.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40437>

Marom, Mohammad Nailul., & Suyanto. "Akibat Hukum Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum oleh Kejaksaan Agung (Deponering)". *Jurnal Pro Hukum*, Volume 8, Nomor 2, hlm. 7, 2019.

<https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.957>

Mendrofa, Amiziduhu. "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi; Konsep dan Regulasi". *Jurnal Litigasi*, Volume 16, Nomor 1, hlm. 2807-2811, 2015.

<https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i1.54>

Pratama, Mochamad Ramdhan., & Januarsyah, Putra Zenno. "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 4, Nomor 2, hlm. 250, 2020.

<https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/350>

Rafiqi, Ilham Dwi. "Tafsir Wewenang Seponering Jaksa Agung Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016". *Widya Yuridika; Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, hlm. 309, 2021.

<https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2614>

Ratnasari, Desi., Lasmadi, Sahuri., & Sudarti, Elly. "Kedudukan Hukum Deponering dalam Sistem Peradilan Pidana". *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 24, 2021.

<https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12053>

Santosa, I Kadek Darma., Yuliartini, Ni Putu Rai., & Mangku, Dewa Gede Sudika. "Pengaturan Asas Oportunitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 9, Nomor 1, hlm. 74, 2021.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31429>

Sari, Intan Purnama. "Tinjauan Yuridis Penerapan Deponering sebagai Alasan Pelaksanaan Asas Oportunitas oleh Jaksa Agung Republik Indonesia". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 11, 2018.

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/21778>

Sudirdja, Rudi Pradisetia Sudirdja. "Penguatan Kewenangan Penuntut Umum melalui Pengesampingan Perakara Pidana dengan Alasan Tertentu". *Jurnal Litigasi*, Volume 20, Nomor 2, hlm. 297, 2019.

<https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i2.2032>

Syawawi, Reza. "Diskresi dan Potensi Korupsi dalam Penyelesaian Masalah Hukum terkait Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (Analisis terhadap Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016)". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 18, Nomor 3, hlm. 423-427, 2021.

<https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.735>

Triwati, Ani. "Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6, Nomor 1, hlm. 43, 2021.

<http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2092>

Yudha, Gema. "Lembaga Deponering sebagai Implementasi Asas Oportunitas Perkara Pidana Indonesia". *Unies Law Review*, Volume 2, Nomor 3, hlm. 332, 2020.

<https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.126>

Yuhdi, M. "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum". *Jurnal Pendidikan Pancasiala dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, hlm. 96, 2014.

<http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5520>

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Skripsi/Tesis/Disertasi

Karniasari, Arin. “Tinjauna Teoritis, Historis, Yuridis, dan Praktis terhadap Wewenang Jaksa Agung dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum”. *Tesis Magister Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta*, hlm. 131, 2012.
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20315934&lokasi=lokal>

E. Website

Annur, Cindy Mutia. (2022, November 03). “KPK Tangani 1.310 Kasus Tindak Pidana Korupsi Sejak 2004 hingga Oktober 2022”. *Databoks*, Berita Online. Diakses pada 16 Juli 2023 dari Databooks:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/03/kpk-tangani-1310-kasus-tindak-pidana-korupsi-sejak-2004-hingga-oktober-2022>

Athifah, Nienda Farras. (2023, Maret 03). “Data ICW 2022: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp. 42,727 T”. *Metrotvnews.com*, Berita Online. Diakses pada 17 Juli 2023 dari Metrotv News:
<https://www.metrotvnews.com/play/NP6CZ1EX-data-icw-2022-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp42-727-t>

- ICW, Divisi Korupsi Politik. (2023, Februari 01). “Memburuknya IPK Indonesia 2022: Gagal Total Pemberantasan Korupsi Jokowi”, *Indonesia Corruption Watch*, Siaran Pers. Diakses pada 19 Juli dari Indonesia Corruption Watch: <https://icw.or.id/Zxoa>
- Keizer, Donny De. (2016, Maret 04). “Dialog: Kontroversi Deponering AS & BW #2”. *BeritaSatu Youtube Vidio*, Menit 1:10. Diakses pada 26 Agustus 2023 dari Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=tOYzpdZw9Bs>
- Waluyo, Andylala. (2016, Maret 04). “Jaksa Agung *Deponering* Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto”. *VOA Indonesia*, Berita Online. Diakses pada 26 Agustus 2023 dari Voa Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/jagung-deponering-kasus-abraham-samad-dan-bambang-widjojanto /3219269.html>